

# Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Sekretariat Jl. Rancakas 7B Mataram Telp (0370) 637388*

---

## KRONOLOGI Pengerusakan Pura Sangkareang

### PROLOG

Pada awal bulan Januari 2008, jalan masuk areal parkir para pemedeak untuk melaksanakan sembahyang ditutup dengan pagar bambu oleh masyarakat setempat, atas perintah salah seorang warga yang secara keagamaan mempunyai pengikut atau berpengaruh di Dusun Sangkareang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat setempat yang terlibat dalam pelaksanaan Renovasi Pura dimaksud, dilarang atau diintimidasi oleh pihak tertentu. Nampak juga adanya pemblokiran terhadap supply material yang disuplai oleh masyarakat setempat.

Pada hari Minggu, 13 Januari 2008 dini hari pukul 00.30 wita, sekelompok orang mendatangi Pura melakukan intimidasi dengan cara memainkan sinar lampu senter seolah-olah memanggil pekerja yang menginap di Pura untuk keluar. Hal ini sama sekali tidak direspon. Atas peristiwa tersebut Panitia memohon bantuan ke aparat keamanan, dalam hal ini adalah Polsek Narmada agar berkenan menugaskan anggotanya untuk memberikan perlindungan. Kapolsek sangat merespon positif dan mengirimkan 2 anggota secara bergilir.

Pada hari Selasa pagi tanggal 15 Januari 2008, aktifitas pekerja berjalan dengan lancar untuk menyelesaikan pekerjaan dan mempersiapkan Upacara Ngenteg Linggih (tgl 22 Januari 2008) yang akan dilaksanakan sesuai dengan dudonan upacara.

Jam 11.00 wita aparat pemerintah tingkat kecamatan dan desa mengunjungi lokasi Pura dengan tujuan :

1. Memperkenalkan diri karena baru sehari menjabat selaku Camat Narmada.
2. Mencari informasi tentang legitimasi pengurus Krama Pura Sangkareang ; dalam artian eksistensinya dan koordinasinya dengan lembaga Umat Hindu dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi NTB.

Jam 15.30 wita Kapolres Lombok Barat beserta rombongan Muspika tingkat Kecamatan dan KUA didampingi PHDI Kabupaten Lombok Barat mengunjungi lokasi Pura Sangkareang. Kapolres Lombok Barat menanyakan tentang material yang digunakan untuk merenovasi Pura Sangkareang, yang dengan tegas dijawab oleh saudara I Made Getul Arnawa selaku Sekretaris Panitia Renovasi Pura Sangkareang bahwa seluruh material yang digunakan dibeli dari masyarakat setempat, sedangkan semen dibeli dari toko bahan bangunan yang ada di Desa Keru. Untuk membuktikan hal tersebut beberapa lembar nota pembelian ditunjukkan kepada Kapolres yang kemudian diserahkan kepada Kapolsek Narmada.

Kapolres Lombok Barat setelah menerima penjelasan dan melihat nota-nota tersebut, secara terus terang beliau menyatakan bahwa diluar berkembang isu seluruh material yang dipergunakan untuk kegiatan Renovasi Pura berasal dari Panitia Renovasi / Pembangunan Pura Penataran Agung Rinjani Kebaloan Desa Senaru Kecamatan Bayan Lombok Barat (yang dibubarkan oleh rapat Muspida Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Nopember 2007).

Setelah Kapolres Lombok Barat meninggalkan lokasi Pura, Untuk klarifikasi berkembangnya isu diatas Muspika Kecamatan Narmada, Kepala Desa Keru, Panitia Renovasi, Panitia Pelaksana Upacara Ngenteg Linggih, PHDI Kabupaten Lombok Barat bersepakat akan menyelenggarakan pertemuan bertempat di Kantor Camat Narmada pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 jam 09.00 wita.

Jam 19.30 wita salah seorang pekerja (warga setempat) dengan tergesa-gesa menginformasikan bahwa **diperkirakan pada jam 22.00 wita akan ada aksi pengerusakan Pura**, informasi tersebut dirasakan perlu untuk diketahui oleh :

1. Para pekerja.
2. Beberapa orang Panitia Renovasi Pura.
3. Beberapa orang Panitia Upacara.
4. Beberapa orang warga Umat Hindu yang berdomisili di Desa Keru.
5. Beberapa warga Hindu yang tidak menginap di lokasi Pura yang sempat dihubungi melalui alat komunikasi.

Kurang lebih jam 20.00 wita Kapolsek Narmada beserta 3 orang anggotanya berpatroli dan mampir ke Pura Sangkareang pada kesempatan tersebut saudara I Made Getul Arnawa menyampaikan informasi yang diterima dari salah seorang pekerja (warga setempat). Kapolsek Narmada merespon dan menyatakan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut seraya menanyakan kepada salah seorang anggotanya yang berasal dari desa Keru ; Yang menyatakan bahwa informasi itu diragukan kebenarannya mengingat hubungan yang telah terjalin begitu harmonis antara umat Hindu dengan warga setempat.

Mendengar penjelasan Kapolsek dan anggotanya, umat Hindu yang berada dilokasi Pura itu merasakan mendapat perlindungan, lebih – lebih dengan kepergian Kapolsek beserta 2 orang anggota untuk mengkonfirmasi kepada pemuka agama setempat dan menugaskan 1 orang anggotanya untuk tetap berada di lokasi Pura.

Sekitar jam 22.00 wita umat Hindu yang menginap dipura melakukan persembahyangan bersama memohon ketabahan dan kedamaian.

#### **KEJADIAN**

Jam 23.15 wita, umat Hindu yang baru selesai melaksanakan persembahyangan dan bersiap – siap untuk beristirahat tiba-tiba dikejutkan oleh adanya signal lampu senter yang sinarnya berputar ke arah langit, setelah sinar lampu itu hilang disusul dengan teriakan serempak “serbu” seraya mengumandangkan salah satu simbol keagamaan, diikuti dengan lemparan batu dan akhirnya masuk ke areal Pura dan membakar Pura. Umat Hindu yang ada dilokasi merasa tidak perlu memberikan reaksi karena secara terus menerus dilempari batu dan benda – benda keras lainnya disamping secara kuantitas sangat kecil dibandingkan dengan massa yang melakukan pengrusakan dan karena posisi yang tidak memungkinkan. Diperkirakan massa yang melakukan

pengrusakan jumlahnya hampir mencapai 1.000 ( seribu ) orang, sedangkan umat Hindu yang ada di lokasi kejadian hanya 21 orang.

Sepanjang tidak mengancam keselamatan jiwa Umat Hindu yang ada di Lokasi Pura Sangkareang, peristiwa pengrusakan tersebut tidak dikomunikasikan kepada umat Hindu yang ada di sekitar Pura dan di wilayah lainnya, karena menyadari hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik terbuka yang berkepanjangan seperti di Ambon dan Poso.

Tindakan yang paling tepat diambil pada saat itu adalah mohon perlindungan kepada Aparat Kepolisian

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008, sekitar jam 09.30 bertempat di Kantor Camat Narmada dilangsungkan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan umat Hindu (ketua PHDI Kab. Lombok Barat, Ketua PHDI Kecamatan Narmada, Pedanda Gede Putra Pidada Keniten, seorang unsur Panitia Renovasi dan Tokoh Masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga) Umat Islam beserta Muspika.

Materi pertemuan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, namun yang berkembang adalah masalah perijinan Pendirian Rumah Ibadat ( Pura ). Kegiatan yang dilakukan oleh panitia adalah merenovasi Pura yang telah ada sejak abad 17, BUKAN Pendirian Rumah Ibadat seperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 09 Tahun 2006 dan No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Toga & Toma Dusun Sangkareang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat bersikeras bahwa ketentuan PBM tersebut harus diterapkan terhadap kegiatan Renovasi Pura yang sedang dilakukan, bahkan melarang semua bentuk kegiatan upacara keagamaan di Pura tersebut, padahal kegiatan renovasi tahap ketiga secara fisik sudah selesai dilaksanakan dan direncanakan untuk melaksanakan Upacara Ngenteg Linggih dengan dudonan sebagaimana terlampir. Oleh karena tidak menghasilkan kesepakatan, maka pertemuan ditunda dan dilanjutkan jam 17.00 wita.

Pertemuan pada sore hari juga tidak menemukan kesepakatan karena Toga dan Toma yang hadir pada pagi hari mewakilkan kepada beberapa warga desa Keru dan KUA, sehingga tidak berani mengambil keputusan karena sudah diperintahkan bahkan diancam jangan kembali ke Keru apabila tidak menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang dikemukakan pada pertemuan pagi hari.

Setelah mendengar pendapat ke dua belah pihak dan Kapolres Lombok Barat, Camat Narmada menyimpulkan bahwa permasalahan ini diangkat ke tingkat Kabupaten Lombok Barat. Perwakilan umat Hindu menunggu pemberitahuan pertemuan dimaksud.

## **EPILOG**

Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 jam 17.00 wita bertempat di Pendopo, Panitia Renovasi, Krama Pura Sangkareang dengan didampingi oleh PHDI Prov. NTB diundang Gubernur NTB dalam rangka menyikapi pengrusakan dan pembakaran Pura Sangkareang. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Camat Narmada, dan Kepala Bakesbanglinmas Prov. NTB. Dalam pertemuan tersebut Camat Narmada menginformasikan bahwa di tingkat Kabupaten telah dilakukan pertemuan tanpa ada perwakilan umat Hindu. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekda Lombok Barat yang secara substansial mengukuhkan permohonan Toma

dan Toga yang direkomendasi oleh Kepala Desa Keru dengan menunjukkan lembar disposisi Bupati Lombok Barat diatas surat permohonan tersebut. Gubernur NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada umat Hindu atas kedewasaannya sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal. Selanjutnya diperintahkan kepada Camat untuk bersama-sama dengan perwakilan umat Hindu memberikan penjelasan kepada Bupati Lombok Barat yang lebih rinci sesuai dengan kondisi di lapangan berkaitan dengan keberadaan Pura Sangkareang sambil melakukan pendekatan untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak merugikan demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

#### **PENUTUP**

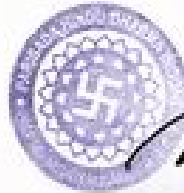
Diskripsi ini disusun berdasarkan pengamatan langsung dan informasi dari Pengurus Krama Pura Sangkareang, Panitia Renovasi dan Panitia Upacara Ngenteg Linggih serta Muspika Kecamatan Narmada.

Mataram, 18 Januari 2008

Ketua,



dr. I.K. Gerudug, MPH



Sekretaris,



Dr. Ir. K.G. Wirawan, M.Ag., Se.